

## LAMPIRAN 1.1 Wawancara Narasumber

### Identitas Narasumber:

- Narasumber : Lisbet, S.Ip., M.Si.
- Jabatan/Posisi : Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam  
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI
- Hari/Tanggal : Senin, 17 Februari 2025
- Tempat : Ruang Pusat Analisis Keparlemenan BK DPR RI
- Topik Wawancara : Peran DPR RI dalam Pencegahan Ancaman  
Narkoba di Indonesia melalui Forum AIPACODD

### Transkrip Wawancara

P: Mengapa narkoba menjadi permasalahan yang penting dalam agenda diplomasi parlemen DPR RI?

J: Narkoba tidak hanya mengancam bagi kemanusiaan dan kemaslahatan generasi saja, tetapi juga bagi kebangkitan ekonomi Indonesia yang dimana ekonomi merupakan salah satu aspek penting bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, terlebih ancaman narkoba memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi potensi risiko lemahnya ekonomi. Uniknya, peristiwa permasalahan tersebut terjadi secara paradoks, penyebab peredaran narkoba yang tinggi di Indonesia akibat permasalahan ekonomi bagi sebagian masyarakat sehingga mengambil jalan tengah yaitu pelaku kejahatan narkoba (distributor).

P: Mengapa diplomasi parlemen menjadi penting?

J: Perlu diketahui, DPR RI sesuai amanat konstitusi memiliki fungsi diplomasi parlemen untuk mendukung pelaksanaan upaya politik luar negeri. Fungsi diplomasi yang dimiliki DPR RI bukanlah aktor tunggal utama, tetapi sebagai diplomasi pendukung pemerintah di kancah internasional dengan tetap membawa aspirasi masyarakat Indonesia di kancah internasional. Justru sebelum anggota DPR RI melangsungkan diplomasinya, dalam hal ini AIPACODD, mereka berkoordinasi dengan pemerintah dulu yaitu BNN dan Polri untuk memantapkan dan sinkronisasi pesan-pesan diplomasi supaya tetap selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

P: Bagaimana cara anggota DPR RI bisa menyukseskan pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen di forum AIPACODD?

J: Cara terbaik yang telah dilakukan adalah mengedepankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak meliputi masyarakat, komunitas, NGO, di tingkat nasional dan regional serta negara anggota AIPACODD. Mengingat prinsip non-intervensi menjadi hal yang wajib ditaati di ASEAN, maka sebagai salah satu unsur ASEAN, Indonesia menitikberatkan kolaborasi dengan *stakeholder*.

P: Apa hambatan yang dialami oleh DPR RI selama melaksanakan fungsi diplomasi parlemen di AIPACODD?

J: Hambatan yang dialami oleh DPR RI meliputi faktor dilematis juga, seperti prinsip non-intervensi ASEAN, walaupun prinsip tersebut terbukti sukses dan menjunjung tinggi penghormatan kedaulatan masing-masing negara, tetapi menjadi faktor hambatan tersendiri karena sebagai negara anggota perlu mendorong terus

menerus untuk mencapai pemahaman bersama. Hambatan berikutnya datang akibat perbedaan definisi atas permasalahan narkoba seperti terdapat beberapa jenis yang legal di suatu negara tetapi di negara lainnya dilarang ketat. Secara instansi, DPR RI dalam melaksanakan fungsi diplomasi parlemen memiliki keterbatasan wewenang, mengingat DPR RI sebagai lembaga legislatif tidak bisa mengambil keputusan secara konkrit layaknya eksekutif, tetapi tetap bisa menjadi pendukung pelaksanaan politik luar negeri seperti menjalin persahabatan dengan negara lain.

#### Dokumentasi Wawancara

